



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA CILEGON  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RASMI WIDYANI
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAH DAN HUKUM
3. NHK : 489322

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 6.850.000.000

1. Bangunan Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , LAINNYA Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/235 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , LAINNYA Rp. 1.000.000.000
4. Bangunan Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, LAINNYA Rp. 2.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , LAINNYA Rp. 2.750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 275.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V E MATIC Tahun 2015, LAINNYA Rp. 150.000.000
2. MOBIL, FORD ECO SPORT Tahun 2015, LAINNYA Rp. 125.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 413.400.000

**D. SURAT BERTAHAGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. ----

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 7.538.400.000



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

7.538.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.